

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN UMP TERHADAP PENGELUARAN MASYARAKAT DI DKI JAKARTA

Rasidin Karo Karo Sitepu¹, Disya Ayu Rivtryana², Allieccia Tesselonika Wijaya³, Angela Ivana⁴, Annisa Oktaviana Putri⁵, Fathiya Najmaayubi⁶, Ilham Hasrimi⁷, Yugi Sa'ban Firdaus⁸

rasidinkaro@apps.ipb.ac.id¹, disya_ayu@apps.ipb.ac.id²,
alliecciawijayaallieccia@apps.ipb.ac.id³, angelaivana@apps.ipb.ac.id⁴,
annisaoktvputri@apps.ipb.ac.id⁵, najmafathiya@apps.ipb.ac.id⁶,
07022002ilham@apps.ipb.ac.id⁷, yugisabanfirdaus@apps.ipb.ac.id⁸

IPB University

ABSTRAK

Upah Minimum yaitu suatu penerimaan yang didapat bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/ pekerja untuk suatu jasa atau jenis pekerjaan yang dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan persetujuan juga peraturan perundang-undangan nantinya dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk adanya tunjangan, mencakup karyawan maupun keluarganya. Kebijakan UMP dapat mempengaruhi pengeluaran masyarakat di DKI Jakarta. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan publik mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan pekerja terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan UMP terhadap pengeluaran masyarakat. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana, kemudian hasil yang diperoleh adalah variabel pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran masyarakat di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pendapatan, UMP, Konsumsi.

Abstract

Minimum Wage is a receipt obtained monthly minimum (lowest) in return from employers to employees/workers for a service or type of work performed and assessed in the form of money determined based on approval and laws and regulations will be paid based on an employment contract between employers and employees including benefits, including employees and their families. UMP policy can affect people's spending in DKI Jakarta. The minimum wage policy is one of the important instruments in public policy influencing the labor market with the aim of increasing the lowest worker income. This research aims to determine the influence of UMP policies on community spending. The method used is a simple linear regression analysis, then the results obtained are income variables that have a positive influence on public spending in DKI Jakarta.

Keywords: Income, UMP, Consumption

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia berhubungan erat dengan kegiatan konsumsi. Baik itu sebagai pemenuhan kebutuhan primer yang terdiri dari sandang dan pangan termasuk kebutuhan terutama yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara memuaskan maka hal tersebut merupakan suatu indikator masih hidup di strata kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti televisi, perabot rumah tangga, sepeda, radio, moda mobilitas dan sebagainya adalah kebutuhan perlengkapan selaras dengan pertambahan tingkat pendapatannya. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang, seseorang harus memiliki tingkat pendapatan agar dapat kesejahteraannya tercapai. Pembangunan ekonomi adalah proses

dalam penerapannya terdapat cakupan faktor yang berkesinambungan satu sama lain, salah satu faktor yang paling penting dalam membangun ekonomi adalah sumber daya manusia, di dalam teori Adam Smith mengatakan bahwa manusia merupakan faktor utama penentu kemakmuran bangsa-bangsa karena manusia merupakan faktor utama produksi, alasannya alam (tanah) tidak ada artinya jika tidak ada manusia yang pandai mengolahnya (Deliarnov, 2016).

Besaran pengeluaran konsumsi masyarakat menjadi salah satu indikator utama mempengaruhi pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB) dengan persentase sebesar 60 %-70% dari PDB tiap tahunnya dapat dianggap konsumsi adalah fungsi dari pendapatan siap pakai. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran konsumsi masyarakat mempunyai peranan besar dalam pendapatan yang diterima pemerintah, jika dibandingkan dengan variabel lain seperti investasi sebagai pengeluaran yang berkontribusi sebesar 7- 11% terhadap PDB (Indikator ekonomi Indonesia,BPS). Pengertian dari Upah Minimum yaitu suatu penerimaan yang didapat bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/ pekerja untuk suatu jasa atau jenis pekerjaan yang dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan persetujuan juga peraturan perundang-undangan nantinya dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk adanya tunjangan, mencakup karyawan maupun keluarganya.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2012) adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih). Boediono (2012) juga menekankan tiga aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meningkatkan pendapatan negara per kapita mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan standar hidup layak . Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat memiliki dampak kompleksitas, termasuk adanya ketimpangan pada pendapatan, ketidakseimbangan sumber daya alam ekologi, dan gagal fungsi sumber daya alam.

Tabel 1. Data Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2010-2020

Tahun	Harga konstan tahun 2010		Harga berlaku	
	PDB (Milyar)	Perubahan (%)	PDB (Milyar)	Perubahan (%)
2010	6,864,133.10	0	6,864,133.10	0
2011	7,287,635.30	6,17	7,831,726.00	14,1
2012	7,727,083.40	6,03	8,615,704.50	10,01
2013	8,156,497.80	5,56	9,546,134.00	10,8
2014	8,564,866.60	5,01	10,569,705.30	10,72

2015	8,982,517.10	4,88	11,526,332.80	9,05
2016	9,434,613.40	5,03	12,401,728.50	7,59
2017	9,912,928.10	5,07	13,589,825.70	9,58
2018	10,425,851.90	5,17	14,838,756.00	9,19
2019	10,949,155.40	5,02	15,832,657.20	6,7
2020	10,722,999.30	-2,07	15,443,353.20	-2,46

Indonesia mengalami variasi dalam pertumbuhan ekonominya di rentang tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2011, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pertumbuhan paling signifikan, khususnya di sektor transportasi dan sarana komunikasi yang mencatat kenaikan sebesar 10,7%. Ditinjau dari sektor industri, penyumbang kontribusi terhadap PDB tahun 2011 adalah sektor pengolahan dengan persentase 24,3%, diikuti oleh pertanian sebesar 14,7%, dan sektor hotel, perdagangan, dan restoran dengan nilai 13,8%. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang kuat, namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Perlambatan ekonomi global, terutama di negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Sebagai salah satu negara pengekspor komoditas besar, kinerja Indonesia dalam kancah ekspor sangatlah berpengaruh saat value atau harga komoditi khususnya batu bara dan cpo (minyak sawit mentah) rendah dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, di tahun 2014 kondisi perekonomian Indonesia mengalami ketidakpastian karena adanya periode Pemilu. Ketidakpastian politik dan perubahan regulasi di dalam negeri dapat menghambat investasi dan mengganggu iklim bisnis, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Value Produk Domestik Bruto memiliki konstansiasi harga pada 2020 sebesar Rp. 10.722,9 triliun dan PDB di tahun 2019 dapat mencapai Rp. 10.949,1 triliun. Dari adanya perubahan yang dihasilkan pada 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Ditinjau dari bidang pengeluaran, hampir semua komponen berkontraksi salah satunya adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai persentase 3,61 persen (BPS, Februari 2021). Alokasi pengeluaran konsumsi rumah tangga terbagi menjadi dua pengeluaran yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Berikut adalah data rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan yang terdiri dari berbagai kategori tahun 2020-2022 yang akan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Daftar Upah Minimum
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2023

Daftar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta	
Tahun	Besaran Upah Minimum
2007	Rp972.605

2008	Rp972.605
2009	Rp1.069.865
2010	Rp1.118.000
2011	Rp1.290.000
2012	Rp1.529.150
2013	Rp2.200.000
2014	Rp2.441.000
2015	Rp2.700.000
2016	Rp3.100.000
2017	Rp3.355.750
2018	Rp3.648.036
2019	Rp3.940.973
2020	Rp4.267.349
2022	Rp4.416.186
2023	Rp4.651.864

Kenaikan Upah Minimum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran masyarakat. Dalam konteks ini, kenaikan upah minimum dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, sebagai indikator yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan lebih daripada pendapatan. Kenaikan upah minimum juga dapat berdampak pada tingkat kemiskinan, di mana peningkatan penghasilan minimum diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kenaikan upah minimum juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, di mana naiknya harga barang akibat kenaikan upah minimum dapat menyebabkan penurunan daya beli rumah tangga. Kemungkinan kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan hidup pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang sedang lesu. (Hidayah, Cloet, & Pradhan, 2021), hal yang menjadi kekhawatiran telah dibuktikan dalam penetapan upah minimum 2022 dengan value yang dirasa jauh dari rasa keadilan.

Dampak dari kenaikan upah minimum terhadap pengeluaran pemerintah juga perlu diperhatikan, di mana naiknya upah minimum dapat berdampak pada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa serta berbagai indikator ekonomi makro. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki dampak yang kompleks, dengan potensi dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan kuantitatif dengan data sekunder sebagai data penelitian. data sekunder ini diperoleh dari BPS DKI Jakarta tahun

2007-2023. Data terdiri dari pendapatan UMP (X) dan konsumsi masyarakat (y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peningkatan UMP terhadap Pengeluaran Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Berikut merupakan penelitian mengenai pengaruh peningkatan UMP terhadap pengeluaran masyarakat provinsi DKI Jakarta dengan metode penelitian regresi sederhana.

Ketentuan penelitian pengujian statistik dalam uji T dipengaruhi peningkatan UMP dalam pengeluaran masyarakat sebagai berikut:

H₀ = Tidak terdapat pengaruh peningkatan UMP terhadap pengeluaran masyarakat.

H₁ = Terdapat pengaruh peningkatan UMP terhadap pengeluaran masyarakat.

Nilai tabel T dan signifikansi: (1) Jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai $sig. > \alpha = 0,05$, maka H₀ diterima; H₁ ditolak; (2) Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai $sig. < \alpha = 0,05$, maka H₀ ditolak; H₁ diterima.

Table 1. Descriptive statistics and correlation between variables

Variabel	T hitung	T Tabel	Signifikansi	Keputusan	Koefisien Determinasi
X1 dan Y	19,134	1,761	0,001	H0 ditolak	98%

Penelitian ini menghasilkan data diatas yaitu diketahui bahwa hasil pengujian mendapat nilai $T_{hitung} 19,134 > T_{tabel} 1,761$ dengan value signifikan 0,001 di mana lebih kecil dari angka 0,05. Data tersebut memiliki indikasi bahwa terdapat pengaruh antara peningkatan UMP terhadap pengeluaran masyarakat atau h₀ ditolak. Artinya, semakin tinggi UMP pun semakin pengeluaran masyarakat tinggi. Koefisien determinasi dihasilkan dari hasil analisis didapat sebesar 98%. Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat dipengaruhi oleh variabel jumlah UMP sebesar 98%. Sedangkan sisanya sebesar 2 % adalah kontribusi dari variabel selain UMP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan UMP dapat mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Dalam penelitian peningkatan UMP mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran masyarakat khususnya dalam pengeluaran konsumsi yaitu sebesar 98%.

Peningkatan UMP ini berdampak positif pada daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2012. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Dani, H. (2021). Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Tarakan.
- Deliarnov. (2016). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febrianica, D. N., & Pratomo, D. S. (2014). Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Hidayah, N.p., Cloet, Q.R., & Pradhan, D. (2021). The Implementation of Labor Development Principles According to Job Creation Law as a Reason to Project Wages Rights. *Bestuur*, 9 (1), 68-76. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49252>

- Indarti, Nurul & Rizki, Paulina. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat di Jawa Barat. Bandung: Jurnal Ekonomi Regional.
- Putra, Aditya M. (2022). Dinamika UMR dan Konsumsi Rumah Tangga: Studi Kasus di Beberapa Kota di Jawa Barat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahadian, Dias. (2023). Inflasi dan Penetapan Upah Minimum: Telaah Terhadap Perekonomian Kota Bogor. Bogor: Jurnal Inflasi dan Kebijakan Publik.
- Sudarsono, Heru. (2019). Kebijakan Upah Minimum dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Makro. Yogyakarta: Penerbit Andi.